

**OPTIMALISASI PENGADILAN PERIKANAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN
DI PERAIRAN INDONESIA**

***THE OPTIMIZATION OF FISHERY COURT AS
FISHERY CRIMES LAW ENFORCEMENT IN
INDONESIA TERRITORIAL SEA***

AFRIANTO SAGITA

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara, 14350
Email: afrimroenk@gmail.com

YOSUA HAMONANGAN SIHOMBING

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara, 14350
Email: yosuahamonangansihombing@gmail.com

Diterima : 10/10/2016

Revisi : 16/06/2017

Disetujui : 19/06/2017

DOI : 10.25216/JHP.6.2.2017.213-232

ABSTRAK

Indonesia memiliki laut yang luas mengandung sumber daya perikanan yang potensial untuk menunjang perekonomian negara. Namun potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena terjadinya tindak pidana perikanan dan belum maksimalnya penegakan hukum di bidang perikanan. Hal itu menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan. Sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan masih terdapat kelemahan dikarenakan kompleksnya permasalahan tindak pidana perikanan, dan juga masalah mekanisme koordinasi antar instansi penegak hukum dan pembentukan pengadilan perikanan yang belum merata di seluruh wilayah pengadilan negeri. Dalam menyelesaikan problematika tersebut, reformasi dalam penegakan hukum menjadi kunci utama yang terfokus kepada substansi hukum dan sumber daya manusia yang mendukung dalam penegakan hukum di bidang perikanan sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kata kunci: tindak pidana perikanan, penegakan hukum, pengadilan perikanan

ABSTRACT

Indonesia's has control over vast seas potential to support the country's economy. However, the potential was not optimal because of fishery crime and the lacking of law enforcement in the field of fisheries. This matter becomes very important and strategic in order to support the fishery development in a controlled manner and in accordance with the principles of sustainable fishery management. However, in practice, law enforcement in fisheries shows weaknesses. It is evident from the very complex problems of criminal offenses fisheries, interagency coordination mechanism problems and the establishment of a fishery court to enforce the law that is not evenly distributed throughout the territory of the district court. In resolving these problems, reforms in law enforcement is the key factor that is focused on the legal and human resources. With this support of fishery law enforcement, it is hoped that fisheries development can be carried out in a sustainable manner.

Keywords: *fisheries crimes, law enforcement, fishery court*

I. PENDAHULUAN

Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya laut yang sangat besar sehingga menjadi salah satu negara yang diperhitungkan oleh negara-negara dunia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Konstitusi, maka segenap kekayaan sumber daya laut tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan disaat yang sama pula kelestariannya tetap terjaga.¹

Laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia, maka tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai konflik atau permasalahan dan pelanggaran atas wilayah tersebut.² Salah satu yang dapat dilihat yaitu penangkapan ikan secara ilegal. Kegiatan yang disebut sebagai pencurian ikan (*illegal fishing*) ini sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Selain itu, masyarakat secara umum yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negerinya sendiri.³

¹ Daliyo et al., *Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi Dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir* (Jakarta: Leusercita Pustaka, 2011). Hlm. 1.

² Aditya Taufan Nugraha and Irman, "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim," *Jurnal Selat 2*, no. 1 (2014). Hlm. 1.

³ Djoko Tibawono, *Hukum Perikanan Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, n.d.). Hlm. 210.

Disisi lain, kegiatan pencurian ikan ini selain merugikan masyarakat umum juga merusak ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai-rantai sumber daya perikanan.⁴Pencurian ikan seringkali dilakukan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dan berakibat rusaknya ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan dikarenakan maraknya tindakan penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal, serta kasus-kasus lainnya yang merugikan kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan. Kegiatan yang termasuk dalam sumber daya perikanan dimulai dari pra-produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.⁵

Dari aspek regulasi, ada beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perikanan yang digunakan untuk menangani permasalahan tindak pidana perikanan. Perangkat aturan yang dipakai dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana pencurian ikan antara lain berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta aturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan untuk Tujuan Komersil, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Penegak hukum dalam bidang perikanan yang tercakup dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meliputi aspek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahkan dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dimuat hukum acara sendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pembentukan Pengadilan Perikanan

⁴ Riza Damanik and Dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia)* (Jakarta: Walhi, 2008). Hlm. 67.

⁵ Supriadi and Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). Hlm. 68.

beserta acaranya (hukum materiil dan formil) dimaksudkan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dari penegakan hukum di bidang perikanan.⁶

Permasalahan tindak pidana perikanan terjadi disebabkan karena tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga berujung pada berbenturannya kepentingan antara institusi negara yaitu penegak hukum dalam menangani permasalahan ini. Adanya permasalahan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak untuk melakukan kejahatan ini.⁷ Hal itu dikarenakan sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di laut Indonesia.⁸

Terkait penanganan permasalahan tindak pidana di bidang perikanan, dalam Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, ada beberapa isu yang menjadi fokus utama dalam perubahannya yaitu:⁹

1. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Masalah pengelolaan perikanan antara lain pelabuhan perikanan, konservasi, perizinan dan kesyahbandaran.
3. Mengenai perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Dari penjelasan di atas, pada isu yang ketiga mensyaratkan adanya pembentukan pengadilan perikanan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, pembentukan pengadilan perikanan harus dilaksanakan di

⁶ Bakri Rudiansyah, "Peran Aparatus Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan Yang Tidak Sah Di Perairan Raja Ampat," *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* 11, no. 2 (2015). Hlm. 1719.

⁷ Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan Dan Perikanan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010). Hlm. 4.

⁸ Marlina and Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan* (Jakarta: Sofmedia, 2013).Hlm. 2.

⁹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perikanan.

seluruh wilayah pengadilan negeri. Namun, pada saat ini masih terbatas di beberapa wilayah pengadilan negeri yaitu Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Tual, dan Pengadilan Negeri Bitung.¹⁰ Ditambah dengan dibentuknya pengadilan perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Ranai,¹¹ serta yang terakhir pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.¹² Sehingga diluar wilayah tersebut, maka perkara tindak pidana di bidang perikanan tetap diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.¹³

Dengan adanya pemeriksaan tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh pengadilan perikanan dan pengadilan negeri, maka ada dualisme dan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan. Dikarenakan terdapat perbedaan antara penanganan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh pengadilan perikanan, yang dimana aparat, sistem, dan proses penanganannya berbeda dengan yang dilaksanakan melalui peradilan umum.¹⁴ Sehingga penanganan tindak pidana di bidang perikanan pada saat ini belum berjalan secara maksimal dan mengalami berbagai hambatan dalam penyelesaiannya.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perairan Indonesia

Indonesia berada di posisi 40⁰ BT-141⁰ BT dan 6⁰ LU-11⁰ LS, terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta terletak di atas tiga lempeng aktif yaitu lempeng Indo Australia, Eurasia, dan Pasifik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 5,8 juta km², dengan wilayah daratan seluas 1.860.359,67 km². Luas laut Indonesia dapat dirinci sebagai berikut :¹⁵

¹⁰ Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

¹¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai

¹² Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke

¹³ Pasal 106 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan* (Jakarta, 2009). Hlm. 89

¹⁵ Nym Ngurah Adisanjaya, *Potensi, Produksi Sumberdaya Ikan di Perairan Laut Indonesia dan Permasalahannya*. hlm. 3. Diakses dari www.eafm-indonesia.net, tanggal 12 September 2016.

Tabel 1¹⁶
Luas Laut Indonesia

No	Perairan	Luas (km ²)
1	Perairan Kepulauan/Laut Nusantara	104.000 km ²
2	Laut Teritorial	284.210,9 km ²
3	Laut 12 Mil (Zona Tambahan)	279.322 km ²
4	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	2.981.211 km ²
	Jumlah	3.648.743,9 km ²

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Tahun 2014

Dari tabel luas laut Indonesia di atas, luas perairan ZEE Indonesia merupakan wilayah perairan yang paling luas dari perairan kepulauan dan perairan teritorial. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar. Pemanfaatan sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan sebagai penopang dalam peningkatan perekonomian nasional. Selain itu, Indonesia memiliki hak dalam pemanfaatan eksklusif dan berkewajiban dalam memberi kesempatan negara lain untuk melakukan konservasi terhadap surplus perikanan.

Secara internasional pengaturan tentang laut tertuang di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang dinyatakan berlaku pada 14 November 1994. Dari ketentuan ini, Indonesia menyatakan untuk mengikuti ketentuan tersebut, maka diadopsi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional. Suatu perkembangan baru dalam Hukum Laut Internasional yaitu diterimanya rezim Negara Kepulauan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta perkembangan yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut.

Secara pengaturan nasional, ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1986 tentang Perairan Indonesia merupakan turunan dan pelaksanaan pengaturan hukum Negara Kepulauan dalam ketentuan Hukum Laut Internasional. Dalam pengaturannya yang dimaksud dengan perairan Indonesia meliputi :

a. Laut teritorial Indonesia

Laut teritorial adalah selebar 12 mil diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia dengan menggunakan garis-garis pangkal lurus kepulauan yang

¹⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2014* (Jakarta, 2014). Hlm. 17

menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia.¹⁷ Status hukum pada laut teritorial Indonesia adalah tunduk di bawah kedaulatan Negara Indonesia. Sehingga segala pengaturan hukum yang berkenaan dengan pemanfaatan laut teritorial baik atas kepentingan nasional maupun kepentingan internasional harus tunduk pada pengaturan dan kebijakan Indonesia.

b. Perairan Kepulauan

Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan Indonesia tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari pantai. Panjang garis pangkal lurus yang dimaksudkan tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali 3% dari jumlah keseluruhan garis pangkal yang mengelilingi kepulauan Indonesia hingga mencapai maksimum 125 meter.¹⁸

c. Perairan Pedalaman.

Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian perairan yang terletak pada sisi darat suatu garis penutup pada mulut sungai, kuala teluk, anak laut dan pelabuhan. Perairan pedalaman ini terdiri dari laut pedalaman dan perairan darat seperti sungai dan danau.

Disisi lain, berdasarkan ketentuan hukum tentang perikanan dinyatakan adanya wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:¹⁹

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI; dan
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.²⁰ Dalam memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan, berdasarkan kesepakatan para pakar, peneliti dan praktisi perikanan maka telah ditetapkan pembagian wilayah yang dikenal dengan

¹⁷ Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

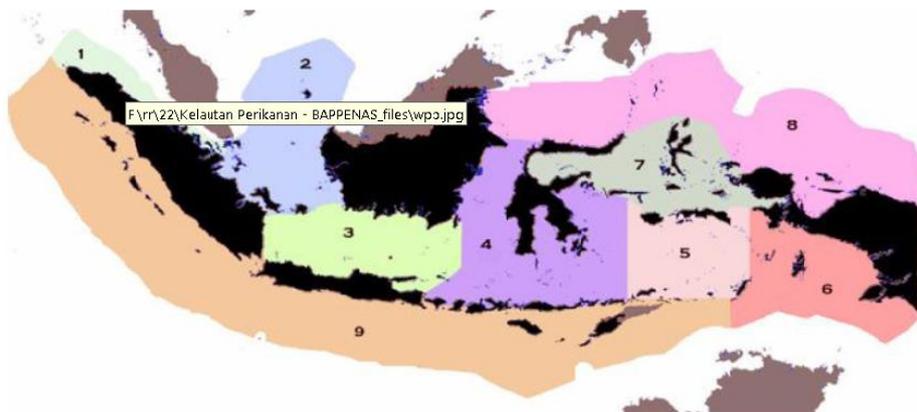
¹⁸ Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

¹⁹ Pasal 5 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

²⁰ Penjelasan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (2) menyatakan yang dimaksud dengan “pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan Republik Indonesia” adalah pengelolaan perikanan di laut lepas.

WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) dengan mempertimbangkan aspek biologis dan lingkungan sumber daya ikan.

Gambar 1²¹
Pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan



Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan, Tahun 2002.
Pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan, dimana: (1) WPP Selat Malaka, (2) WPP Laut Cina Selatan, (3) WPP Laut Jawa, (4) WPP Selat Makasar dan Laut Flores, (5) WPP Laut Banda, (6) WPP Laut Arafuru, (7) WPP Laut Seram dan Teluk Tomini, (8) WPP Laut Sulawesi, (9) WPP Samudra Indonesia.

Data di atas menggambarkan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan antar kawasan dan antar jenis sumber daya. Di sebagian wilayah telah terjadi gejala tangkap lebih (*overfishing*) seperti di Laut Jawa dan Selat Malaka, sedangkan di sebagian besar wilayah timur tingkat pemanfaatannya masih di bawah potensi lestari.²²Selain tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan antar kawasan dan antar jenis sumber daya, saat ini juga masih terjadi konflik dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, kasus konflik perbatasan wilayah perairan negara tetangga, serta masih rendahnya tingkat kepatuhan pemangku kepentingan terhadap ketentuan yang berlaku.

2. Tindak Pidana Perikanan

Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan

²¹ Nym Ngurah Adisanjaya, *Op. Cit.*, Hlm. 5

²² *Ibid.* Potensi lestari (*maximum sustainable yield/MSY*) sumber daya perikanan tangkap diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (*allowable catch*) sebesar 80% dari MSY yaitu 5,12 juta per ton.

kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.²³

Berdasarkan rumusan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kegiatan-kegiatan tindak pidana perikanan secara keseluruhan yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilakukan dalam penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya perikanan.²⁴
2. Kegiatan dengan memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan.²⁵
3. Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan.²⁶
4. Kegiatan yang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya perikanan.²⁷
5. Kegiatan yang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan.²⁸
6. Kegiatan yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.²⁹
7. Kegiatan yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.³⁰
8. Kegiatan yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, pemasaran ikan, penangkapan, pengangkutan, penelitian ikan yang tidak memiliki izin.³¹

Adapun modus operandi tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal yakni kapal penangkap ikan yang melaksanakan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak memiliki izin penangkapan, tindak pidana perikanan dilakukan secara terorganisir oleh jaringan

²³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

²⁴ Pasal 8 dan Pasal 84 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

²⁵ Pasal 9 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

²⁶ Pasal 12 dan Pasal 86 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

²⁷ Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 87 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

²⁸ Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 88 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

²⁹ Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 89 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

³⁰ Pasal 21 dan Pasal 90 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

³¹ Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

pelaku di berbagai negara (*transnational organized crime*).³² Disamping itu, Kejahatan *IUU Fishing* tidak hanya terjadi di sektor perikanan tetapi juga saling berkaitan dengan kejahatan lainnya seperti perdagangan orang, pencucian uang, penyelundupan barang dan satwa liar, kepabeanaan, keimigrasian, ketenagakerjaan dan sebagainya.³³

Secara internasional, penangkapan ikan yang tidak legal atau *illegal fishing*³⁴ di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *unreported* dan *unregulated fishing* yang dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Dengan kata lain *illegal, unreported, unregulate fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut :³⁵

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Kegiatan tindak pidana di bidang perikanan yang marak terjadi di Perairan Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut dan sistem pengelolaan perikanan yang berada di Indonesia. Secara garis besar faktor penyebab terjadinya kegiatan tersebut adalah:³⁶

1. Kebutuhan ikan dunia (*demand*) yang meningkat, yang bertolak belakang dengan pasokan ikan dunia yang menurun, terjadi *overdemand* terutama

³² *Perangi Fisheries Crime, Pemerintah Resmikan IFFAI Bagi Penegak Hukum Perikanan*. Diakses dari news.kkp.go.id, tanggal 14 Juni 2017.

³³ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, *Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)*, 2016. Hlm. 101

³⁴ *Illegal Fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil; mengail, atau memancing. Dalam Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing* (Jakarta: Sinar Grafika, 20015). Hlm. 80.

³⁵ Victor P.H. Nikijuluw, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2008). Hlm. 18.

³⁶ Rohmin Dahuri, *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan* (Jakarta: Pusdiklat Kejangung RI, 2012). Hlm. 4.

- jenis ikan dari laut. Hal inilah yang mendorong armada perikanan dunia untuk melakukan pemburuan ikan di manapun dengan cara legal atau ilegal.
2. Kedua, disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia yang cukup tinggi, sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
 3. *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia kondisi perikanan masih menjanjikan.
 4. Laut Indonesia yang sangat luas dan terbuka, namun kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah yang rawan. Dikarenakan luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) menjadi penarik perhatian untuk masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan tindak pidana perikanan.
 5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka dan pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap.
 6. Masih terbatasnya sarana, prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan pengawasan yang terlihat kurang pada sisi kuantitas dibandingkan dengan luasnya wilayah perairan yang harus diawasi.
 7. Persepsi dan langkah kerjasama antara aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum terorganisasi dengan optimal, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum dan komitmen dalam mengoperasikan kapal pengawas di ZEE Indonesia.

3. Pengadilan Perikanan Sebagai Salah Satu Cabang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari hal itu bahwa atas konsep dan prinsip penting dari negara hukum yaitu adanya jaminan kemerdekaan bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan hal itu maka kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara negara selain Presiden, DPR, MPR dan BPK.³⁷

Pasal 24 ayat (2) UUD NKRI 1945 dan dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama badan-badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam

³⁷ Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 1 menyatakan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung, dilakukan melalui badan-badan peradilan yang berada dalam lingkungan dibawahnya yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Dalam perkembangannya, lembaga peradilan terus mengalami perkembangan dan menjadi beraneka ragam. Perkembangan tersebut terlihat dari adanya pengadilan khusus³⁸ yang dikembangkan di dalam lingkungan pengadilan umum, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan.³⁹ Sebagai salah satu pengadilan khusus, Pengadilan Perikanan berwenang untuk mengadili dan memutuskan tindak pidana secara khusus di bidang perikanan.⁴⁰ Kedudukan dari pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan pengadilan negeri.⁴¹

Pembentukan Pengadilan Perikanan merupakan amanah Pasal 71 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan kata lain, dibentuknya pengadilan perikanan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan.⁴²

Kehadiran Pengadilan Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan. Dalam proses penegakan hukum dapat melengkapi dan menyempurnakan hukum acara dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (di samping mengikuti hukum acara dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga memuat hukum acara khusus). Selain itu, menjamin hukum materiil dan hukum

³⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, "Pengadilan Khusus," in *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013). Hlm. 4.

⁴⁰ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

⁴¹ Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

⁴² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Loc. cit.*, hlm. 2.

acara (formil) bersifat lebih cepat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan.⁴³

Semangat pembentukan pengadilan khusus perikanan ini juga dilandasi dengan semangat untuk mengatasi krisis “ketidakberdayaan” lembaga-lembaga peradilan yang ada dalam menjawab berbagai persoalan hukum khususnya yang terkait penegakan hukum tindak pidana perikanan.⁴⁴ Hal itu dikarenakan wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, memiliki sumber daya perikanan yang potensial dan merupakan sentra perikanan nasional sering menjadi target bagi kapal perikanan asing maupun lokal dalam melakukan penangkapan ikan ilegal⁴⁵ serta jumlah perkara tindak pidana di bidang perikanan dimana pengadilan perikanan tersebut dibentuk semakin meningkat⁴⁶. Proses hukum yang ada dinilai jauh dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah semakin pesatnya kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum di bidang perikanan, maka dibutuhkan suatu lembaga peradilan yang profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang menguasai persoalan tersebut.

4. Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan

Dalam perjalanannya, perkara yang diterima pengadilan perikanan pada tahun 2016 sebanyak 241 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 17 perkara sehingga jumlah beban perkara sebanyak 258 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 184 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 74 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 meningkat 37,71% dari tahun 2015 yang menerima sebanyak 175 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 18,71 % dari tahun 2015 yang berjumlah 155 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah perkara adalah 71,32%.⁴⁷

⁴³ *Ibid.*

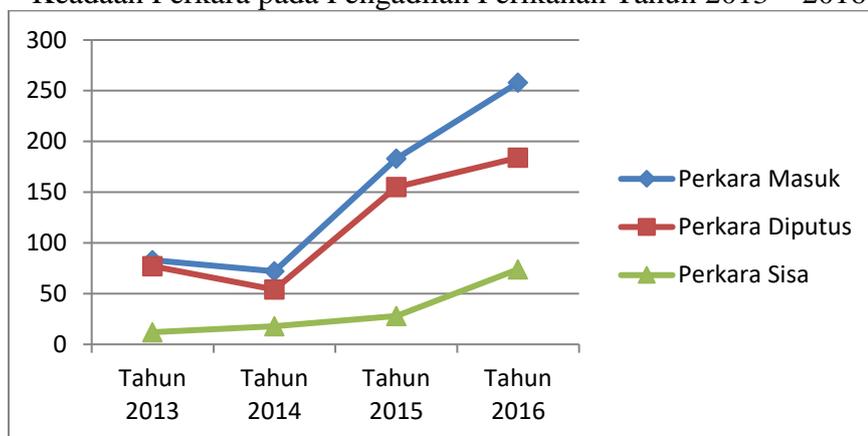
⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke.

⁴⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

⁴⁷ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016* (Jakarta, 2016). Hlm. 88-89

Tabel 2⁴⁸
Keadaan Perkara pada Pengadilan Perikanan Tahun 2013 – 2016



Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 -2016.

Dari pemaparan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkara yang masuk dan diperiksa oleh pengadilan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga perlu dilaksanakannya suatu reformasi di pengadilan perikanan dalam memaksimalkan kinerja dari pengadilan perikanan dalam memutus tindak pidana di bidang perikanan. Reformasi di pengadilan perikanan dapat dilakukan dalam beberapa hal yaitu pada substansi hukum, kelembagaan peradilan dan aparat penegak hukum.

a) Substansi Hukum

Memperhatikan berbagai jenis pengadilan khusus yang ada pada saat ini menunjukkan bahwa belum ada desain kebijakan hukum yang tetap dalam pembentukan pengadilan khusus, terutama pada aspek independensi dan konsistensi. Pengadilan khusus dibentuk hanya dibentuk berdasarkan kebutuhan sosiologis dan faktual yang tidak didasarkan desain yang standar.⁴⁹ Pembentukan pengadilan khusus ini juga terlihat dalam pembentukan Pengadilan Perikanan yang mana dibentuk secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Menurut Hamdan Zoelva, Pengadilan khusus itu terbentuk disamping tidak ada desain konstitusional yang detail baik dalam konstitusi maupun undang-undang mengenai bentuk dan isi pengadilan khusus. Selain itu, karena adanya kelatihan untuk selalu membentuk pengadilan khusus jika ditemukan masalah-masalah khusus yang harus diselesaikan secara khusus pada saat pembentukan undang-undang tertentu. Pembentuk undang-undang membentuk pengadilan khusus hanya berdasarkan situasi yang muncul dalam penegakan hukum. Dalam Hamdan Zoelva, “Aspek Konstitusional Pengadilan Khusus Di Indonesia,” in *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013). Hlm. 180.

⁵⁰ Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 71 ayat (6) menyatakan Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dalam pembentukan peradilan perikanan, pada awalnya dasar hukum lahirnya pengadilan perikanan didasari pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 pada Pasal 71 yang menyatakan bahwa “Dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan”. Namun dalam ketentuan ini, pengaturan suatu kelembangaan pengadilan perikanan hanya diatur dalam 1 (satu) pasal saja. Perubahan ketentuan dari yang sebelumnya menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menyatakan peraturan mengenai pengadilan perikanan ditambah 1 pasal yaitu Pasal 71A sehingga secara keluruhan dalam pengaturan tentang pengadilan perikanan hanya diatur di dalam 2 pasal saja.

Mengacu kepada berbagai pengadilan khusus yang ada, pengaturan tentang pengadilan khusus tersebut diatur dalam ketentuan yang secara khusus juga. Hal itu dapat dilihat dari Pengadilan Anak diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2002, Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.

Dengan demikian, perlunya suatu reformasi di pengadilan perikanan dalam substansi hukum (produk hukum) harus dilaksanakan sebagaimana pengaturan yang mengatur secara khusus seperti pengadilan-pengadilan khusus lainnya. Sehingga dengan adanya pengaturan secara khusus terhadap pengadilan perikanan diluar ketentuan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, memberikan penegasan dan kedudukan yang konsisten bagi pengadilan perikanan dalam menyelesaikan segala permasalahan tindak pidana di bidang perikanan.

b) Kelembangaan Peradilan

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menyatakan diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian diatur pula bahwa pembentukan pengadilan perikanan dilakukan dan diterapkan secara bertahap

sesuai dengan kebutuhan melalui keputusan presiden.⁵¹ Berkenaan dengan ketentuan hukum yang mengatur, dapat ditafsirkan bahwa para pembentuk undang-undang ini sebenarnya menghendaki agar dapat dibentuk di setiap pengadilan negeri di seluruh Indonesia.⁵²

Pembentukan pengadilan perikanan masih belum merata diseluruh wilayah pengadilan negeri. Pembentukan peradilan perikanan pertama kali adalah di wilayah Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Bitung. Selanjutnya pada tahun 2010, dibentuk dua peradilan perikanan di wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan Pengadilan Ranai.⁵³ Pembentukan peradilan perikanan yang selanjutnya pada tahun 2014 di wilayah Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, Pengadilan Negeri Merauke.⁵⁴

Terbentuknya pengadilan perikanan tersebut hanya berada di beberapa provinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Kepulauan Riau, Maluku, Papua Barat dan Papua. Hal itu berbanding terbalik dengan pertumbuhan perekonomian subsektor perikanan triwulan III-2015 diwarnai oleh perubahan laju implisit di subsektor perikanan. Dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

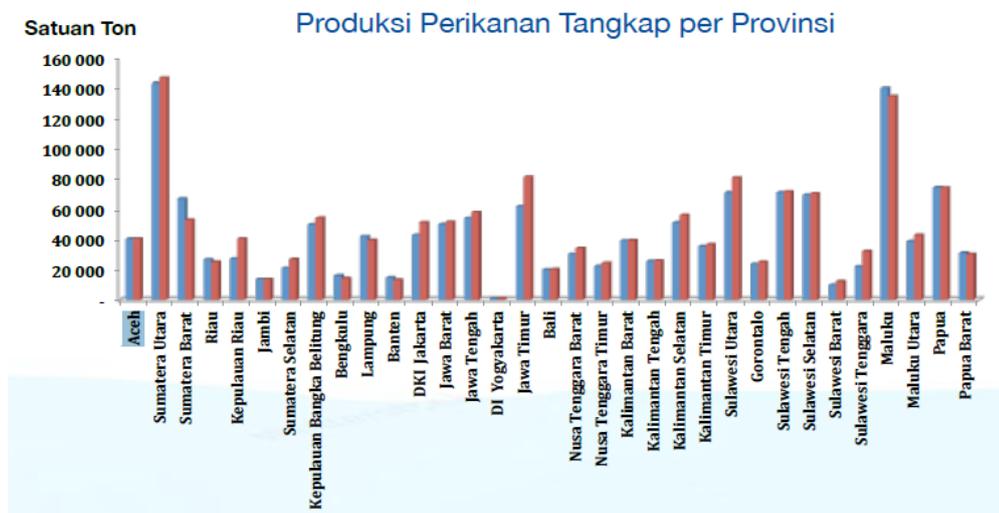
⁵¹ Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

⁵² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. cit.*, hlm. 89.

⁵³ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

⁵⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke.

Gambar 2⁵⁵



Sumber : Laporan Kinerja Satu Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015.

Dari gambar di atas, meningkatnya pertumbuhan perikanan menjadikan seluruh wilayah perairan Indonesia menjadi daerah rawan tindak pidana perikanan. Hal itu dikarenakan negara Republik Indonesia yang memiliki luas laut yang lebih luas daripada luas wilayah daratan yang mengakibatkan setiap provinsi yang ada berbatasan langsung dengan wilayah perairan. Dari gambar tersebut, terlihat beberapa wilayah yang memiliki produksi perikanan yang besar tetapi tidak memiliki pengadilan perikanan dalam pemberantasan tindak pidana perikanan, seperti Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan sebagainya.

Permasalahan yang muncul kemudian yaitu ketika daerah yang tidak memiliki peradilan perikanan harus menyelesaikan permasalahan tindak pidana perikanan melalui pengadilan negeri. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana perikanan di pengadilan perikanan menggunakan ketentuan hukum acara yang khusus dari ketentuan yang umum pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.⁵⁶

c) Aparat Penegak Hukum

Selain itu, permasalahan fundamental juga terjadi dalam hal personelia peradilan. Dalmajelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana

⁵⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laporan Kinerja Satu Tahun Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015* (Jakarta, 2015). Hlm. 71.

⁵⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). Hlm. 66.

perikanan. Adapun Pengadilan Perikanan disidangkan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas karir dan dua hakim *ad hoc* perikanan. Sampai dengan tahun 2015, jumlah hakim *ad hoc* sebanyak 56 orang.⁵⁷ Diperlukannya hakim-hakim *ad hoc*⁵⁸ pada pengadilan perikanan yaitu untuk menunjang pemeriksaan sidang tindak pidana perikanan yang dikarenakan hakim *ad hoc* yang memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus dalam bidang perikanan. Namun, keberadaan hakim-hakim *ad hoc* yang ada saat ini, telah menimbulkan masalah sebagai contoh adalah pembentukan pengadilan perikanan yang tidak menangani perkara selama 2 (dua) tahun karena tidak ada perkara yang masuk, tetapi hakim *ad hoc* di pengadilan perikanan tetap menerima gaji dari negara.⁵⁹

Dengan demikian, pembaharuan kelembagaan dalam pengadilan perikanan merupakan suatu keharusan untuk menekan angka tindak pidana perikanan. Hal itu dilaksanakan dengan cara membentuk pengadilan perikanan di setiap provinsi. Namun kedudukan dari pengadilan perikanan berada di ibu kota provinsi sama halnya dengan PTUN. Hal tersebut dikarenakan, jika dibentuk diseluruh wilayah pengadilan negeri pada tingkat kabupaten/kota maka yang akan menjadi problemnya yaitu perkara tindak pidana yang masuk tidak sebanding banyaknya dengan jumlah pengadilan perikanan. Sehingga hakim-hakim dalam menangani perkara tindak pidana perikanan dapat bekerja secara efektif dikarenakan penanganan perkara terpusat pada satu pengadilan di ibu kota provinsi. Selain itu, hal tersebut dikonstruksikan agar permasalahan tindak pidana perikanan di setiap provinsi diselesaikan melalui pengadilan perikanan di provinsi masing-masing, tidak mengacu kepada wilayah pengadilan yang memiliki peradilan perikanan maupun penanganan perkara di pengadilan negeri yang hukum acaranya berbeda dengan hukum acara dalam pemeriksaan tindak pidana perikanan di peradilan perikanan. Sehingga dalam proses penanganannya diharapkan akan lebih memungkinkan bagi terlaksananya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana perikanan.⁶⁰

⁵⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Refleksi 2015 Dan Outlook 2016 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan* (Jakarta, 2016). Hlm. 32

⁵⁸ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 angka 9 menyatakan Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

⁵⁹ Dewan Perwakilan Republik Indonesia, *Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI Dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)*, pada tanggal 27 Agustus 2015.

⁶⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. cit.*, hlm. 88.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dalam penanganan tindak pidana perikanan, maka diperlukan pembaharuan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan. Reformasi tersebut terfokus kepada substansi hukum (produk hukum), kelembagaan peradilan dan aparaturnya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh hakim. Pembaharuan pada substansi hukum dilaksanakan dengan membentuk suatu peraturan khusus diluar Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yang mengatur secara khusus tentang kelembagaan pengadilan dan hukum acara dalam penanganan tindak pidana perikanan. Disamping itu, mengenai kelembagaan peradilan, dengan dibentuknya peradilan perikanan yang berada di setiap ibu kota provinsi menjadikan penanganannya oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana perikanan lebih efektif dan efisien.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung, Mahkamah. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016*. Jakarta, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pengadilan Khusus." In *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*. Jakarta, 2009.
- Dahuri, Rohmin. *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: Pusdiklat Kejagung RI, 2012.
- Daliyo, Zainal Fatoni, Soewartoyo, and Sumono. *Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi Dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir*. Jakarta: Leusercita Pustaka, 2011.
- Damanik, Riza, and Dkk. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia)*. Jakarta: Walhi, 2008.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing*. Jakarta: Sinar Grafika, 20015.
- Marlina, and Faisal. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: Sofmedia, 2013.
- Nikijuluw, Victor P.H. *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2008.
- Nugraha, Aditya Taufan, and Irman. "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim." *Jurnal Selat 2*, no. 1 (2014).

Perikanan, Kementerian Kelautan dan. *Laporan Kinerja Satu Tahun Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015*. Jakarta, 2015.

———. *Refleksi 2015 Dan Outlook 2016 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*. Jakarta, 2016.

Perikanan, Kementrian Kelautan dan. *Laporan Kinerja Kementrian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2014*. Jakarta, 2014.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. *Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)*, 2016.

Rudiansyah, Bakri. “Peran Aparatus Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan Yang Tidak Sah Di Perairan Raja Ampat.” *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* 11, no. 2 (2015).

Solihin, Akhmad. *Politik Hukum Kelautan Dan Perikanan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.

Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Supriadi, and Alimuddin. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Tibawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, n.d.

Zoelva, Hamdan. “Aspek Konstitusional Pengadilan Khusus Di Indonesia.” In *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perikanan Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

Internet

Adisanjaya, Nym Ngurah. *Potensi, Produksi Sumberdaya Ikan di Perairan Laut Indonesia dan Permasalahannya*. hlm. 3. Diakses dari www.eafm-indonesia.net, tanggal 12 September 2016.